



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah yang berjangka waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025–2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategik yang telah ditetapkan dan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya



Demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya.

Mempawah, 14 Juli 2025

KEPALA BPKAD
KABUPATEN MEMPAWAH



Dra. IRNAWATI, M.Si
Pemdana Utama Muda
NIP. 19720510 199203 2 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika 8

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah 31

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah 32

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 40

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

3.3. Program dan Kegiatan 42

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

BAB V PENUTUP 73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah pemerintah dalam menjalankan *pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government)*. Orientasi pada input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. Dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan di bidang Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang Keuangan dan Aset;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Aset;
- g. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Keuangan dan Aset;



- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Keuangan dan Aset sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah juga merangkap sebagai kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menerima pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian terdapat 2 (dua) fungsi yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) Pengguna Barang (PB).

Dengan demikian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi dan elemen pokok di Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset



Daerah Kabupaten Mempawah digunakan sebagai landasan melaksanakan fungsi. Sehingga tujuan/sasaran strategis sebagaimana dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat direalisasikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 juga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kedua peraturan sebagaimana tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD)



1945;

3. Landasan operasional:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5



Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

- i. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dimaksudkan sebagai bagian untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 yang merupakan implementasi dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2026;
2. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025;
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;



4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat



BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH**

BAB V PENUTUP.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pengelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD pengelola keuangan melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah, perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan BPKAD Tahun 2025 dan Capaian Renstra BPKAD yang merupakan Aktualisasi dari RENSTRA Tahun 2025-2026.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan.

Dari 3 (tiga) Program tersebut, 1 (satu) program merupakan program penunjang yang diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



Program dan kegiatan tahun 2024 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tergambar dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD sampai dengan Tahun 2024 (tahun berjalan) sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mempawah

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.		Urusan penunjang Urusan Pemerintahan									
5.02		Keuangan									
5.02	02.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	100	300	75,0
5.02	02.2.01	- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100	100	100	100	100%	100	300	75,0
5.02	02.2.01 01	- Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	- Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01 02	- Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	- Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01 03	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi RKA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.01 04	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi perubahan RKA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.01 05	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi DPA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.01 06	- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	- Jumlah dokumen verifikasi perubahan DPA-SKPD yang tersusun	31	31	31	31	100%	31	93	23,25

Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.01 07	- Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	- Jumlah dokumen peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01 08	- Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	- Jumlah dokumen peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.01 09	- Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran	- Jumlah dokumen tentang regulasi serta kebijakan anggaran yang tersusun	4	4	4	4	100%	4	12	3
5.02	02.2.02	- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.02 01	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Dokumen kas daerah/dokumen (B9) yang dikelola dalam setahun	264	264	264	264	100%	264	792	198
5.02	02.2.02 03	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Dokumen anggaran kas dan SPD	860	860	860	860	100%	860	2580	645
5.02	02.2.02 05	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Dokumen Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7	7	7	7	100%	7	21	5,25

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.02 06	- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	- Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan transaksi non tunai	12	12	12	12	100%	12	36	9
5.02	02.2.02 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Dokumen Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.02 09	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Dokumen penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D yang direkonsiliasi setiap tahunnya	12	12	12	12	100%	12	36	9
5.02	02.2.02 10	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang tersusun	20	20	20	20	100%	20	60	15
5.02	02.2.02 11	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Perangkat daerah yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan	31	31	31	31	100%	31	93	23,25

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.03	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan keuangan daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.03 01	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Dokumen berita acara Rekon Kas Penerimaan dan Rekon Kas Pengeluaran	124	124	124	124	100%	124	372	93
5.02	02.2.03 02	- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan Transfer, Belanja dan Pembiayaan	15	15	15	15	100%	15	45	11,25
5.02	02.2.03 03	- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.03 04	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.03 05	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang tersusun	4	4	4	4	100%	4	12	3

Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.03 06	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.03 08	- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.03 09	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	02.2.03 10	- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Dokumen Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	1	-	-	-	-	-	-	-
5.02	02.2.03 11	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Dokumen pendukung dalam proses penyelesaian laporan keuangan SKPD	31	31	31	31	100%	31	93	23,25
5.02	02.2.03 12	- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	- Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	10	22	25	25	100%	25	72	18
5.02	02.2.04	- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase ketepatan waktu pencairan dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.04 08	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	02.2.04 09	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.04 10	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	02.2.05	- Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyelesaian data Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	02.2.05 02	- Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	- Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sisten informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	03.2.01	- Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	03.2.01 01	- Penyusunan Standar Satuan Harga	- Jumlah standar satuan harga yang disusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03.2.01 02	- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	0	1	1	100%	2	3	0,75
5.02	03.2.01 03	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	5	5	5	5	100%	5	15	3,75

Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	03.2.01 04	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Kebijakan Pengelolaan barang milik daerah	2	5	5	5	100%	5	15	3,75
5.02	03.2.01 05	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03.2.01 06	- Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) barang milik	1	0	1	1	-	1	2	0,5
5.02	03.2.01 07	- Pengamanan Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	3	3	3	3	100%	3	9	2,25
5.02	03.2.01 08	- Penilaian Barang Milik Daerah	- Jumlah laporan Hasil Penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	2	7	2	2	100%	2	11	2,75
5.02	03.2.01 09	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	- Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD	5	5	5	5	100%	5	15	3,75
5.02	03.2.01 10	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen hasil optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	20	18	20	20	100%	20	58	14,5
5.02	03.2.01 11	- Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah	- Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD	3	35	3	3	100%	3	41	10,25
5.02	03.2.01 12	- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	03.2.01 13	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan BMD pemerintah kabupaten/kota	31	31	31	31	100%	31	93	23,25

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.01	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.01 01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
5.02	01.2.01 02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.01 06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	3	3	3	3	100%	3	9	2,25
5.02	01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi	100	100	100	100	100%	100	300	75

Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01.2.02 01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	62	62	62	62	100%	62	186	46,5
5.02	01.2.02 03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.02 05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.02 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.03 01	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.05 02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	49	55	55	55	100%	55	165	41,25
5.02	01.2.05 10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan	10	7	10	10	100%	10	27	6,75

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.06 01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 07	- Penyediaan Bahan/Material	- Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.06 09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7	7	7	7	100%	7	21	5,25
5.02	01.2.06 10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4500	1500	1500	1500	100%	1500	4500	1125
5.02	01.2.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.07 02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	0	2	2	100%	2	4	1
5.02	01.2.07 06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01.2.07 10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat terpenuhi	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.08 01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	150	50	150	150	100%	150	350	87,5
5.02	01.2.08 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	36	36	36	100%	36	108	27
5.02	01.2.08 04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	5	12	12	100%	12	29	7,25
5.02	01.2.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100%	100	300	75
5.02	01.2.09 01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
5.02	01.2.09 02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	21	21	21	100%	21	63	15,75
5.02	01.2.09 09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02	01.2.09 10	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	52	1	1	100%	1	54	13,5
5.02	01.2.09 11	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	26	2	2	100%	2	30	7,5



Sumber dana merupakan sarana penunjang yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025, menjadi bagian penting yang menjelaskan asal-usul pembiayaan atas program dan kegiatan yang direncanakan selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Adapun realisasi Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel. 2.2
Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Per 31 Juni 2025
Kabupaten Mempawah

KODE		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KET
PROG	KEG			Rp.	%		
1		2	3	4	5	6	7
5	02	BIDANG URUSAN KEUANGAN	154.855.274.073,00	31.661.510.649,00	20,45	123.193.763.424,00	
	01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	6.552.766.208,00	2.922.367.487,00	44,60	3.630.398.721,00	
	2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	33.999.900,00	25.784.000,00	75,84	8.215.900,00	
	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.000.000,00	4.970.000,00	99,40	30.000,00	
	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	2.936.500,00	97,88	63.500,00	
	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	2.936.500,00	97,88	63.500,00	
	0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.999.900,00	14.941.000,00	99,61	58.900,00	
	2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	5.870.805.208,00	2.691.592.446,00	45,85	3.179.212.762,00	
	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan	5.779.385.558,00	2.645.714.446,00	45,78	3.133.671.112,00	
	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	56.419.650,00	21.300.000,00	37,75	35.119.650,00	
	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	27.500.000,00	24.578.000,00	89,37	2.922.000,00	
	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
	2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	20.900.000,00	11.430.000,00	54,69	9.470.000,00	
	0006	Penatausahaan barang milik daerah	20.900.000,00	11.430.000,00	54,69	9.470.000,00	
	2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	25.000.000,00	21.364.410,00	85,46	3.635.590,00	
	0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25.000.000,00	21.364.410,00	85,46	3.635.590,00	
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.821.650,00	66.032.579,00	28,86	162.789.071,00	
	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.828.300,00	0,00	0,00	27.828.300,00	
	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	59.250.000,00	15.344.900,00	25,90	43.905.100,00	
	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	36.000.000,00	4.940.500,00	13,72	31.059.500,00	
	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.999.700,00	9.227.500,00	26,36	25.772.200,00	
	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55.745.500,00	34.196.879,00	61,34	21.548.621,00	
	0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	14.998.150,00	2.322.800,00	15,49	12.675.350,00	
	2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	235.400.000,00	95.827.452,00	40,71	139.572.548,00	
	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	235.400.000,00	95.827.452,00	40,71	139.572.548,00	
	2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	137.839.450,00	10.336.600,00	7,50	127.502.850,00	
	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	22.859.450,00	3.650.000,00	15,97	19.209.450,00	
	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	62.000.000,00	623.600,00	1,01	61.376.400,00	
	0009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	0010	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	18.250.000,00	0,00	0,00	18.250.000,00	

KODE		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KET
PROG	KEG			Rp.	%		
1		2	3	4	5	6	7
	0011	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	29.730.000,00	6.063.000,00	20,39	23.667.000,00	
	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	147.392.748.009,00	28.393.413.212,00	19,26	118.999.334.797,00	
	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.500.573.650,00	214.158.800,00	14,27	1.286.414.850,00	
	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	146.046.400,00	0,00	0,00	146.046.400,00	
	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	105.259.100,00	0,00	0,00	105.259.100,00	
	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	102.380.600,00	0,00	0,00	102.380.600,00	
	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	54.839.000,00	0,00	0,00	54.839.000,00	
	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	31.706.600,00	29.830.000,00	94,08	1.876.600,00	
	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	79.230.600,00	0,00	0,00	79.230.600,00	
	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	344.865.300,00	0,00	0,00	344.865.300,00	
	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	528.192.000,00	160.935.200,00	30,47	367.256.800,00	
	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	108.054.050,00	23.393.600,00	21,65	84.660.450,00	
	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	488.170.000,00	128.753.000,00	26,37	359.417.000,00	
	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	
	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	78.650.000,00	19.200.000,00	24,41	59.450.000,00	
	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	
	0007	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	110.000.000,00	12.894.000,00	11,72	97.106.000,00	
	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	227.400.000,00	96.659.000,00	42,51	130.741.000,00	
	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12.120.000,00	0,00	0,00	12.120.000,00	
	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	600.543.178,00	248.540.748,00	41,39	352.002.430,00	
	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	15.000.000,00	4.860.000,00	32,40	10.140.000,00	
	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	126.025.978,00	63.244.390,00	50,18	62.781.588,00	
	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	37.543.200,00	0,00	0,00	37.543.200,00	
	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	216.754.200,00	147.663.058,00	68,12	69.091.142,00	
	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	175.220.000,00	32.773.300,00	18,70	142.446.700,00	
	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	29.999.800,00	0,00	0,00	29.999.800,00	
	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	144.305.461.181,00	27.740.076.854,00	19,22	116.565.384.327,00	
	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	125.606.872.000,00	23.512.505.000,00	18,72	102.094.367.000,00	
	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.424.025.661,00	2.028.369.254,00	27,32	5.395.656.407,00	
	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	11.274.563.520,00	2.199.202.600,00	19,51	9.075.360.920,00	
	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	498.000.000,00	61.883.810,00	12,43	436.116.190,00	
	0003	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	498.000.000,00	61.883.810,00	12,43	436.116.190,00	
	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	909.759.856,00	345.729.950,00	38,00	564.029.906,00	
	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	909.759.856,00	345.729.950,00	38,00	564.029.906,00	

KODE		U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KET
PROG	KEG			Rp.	%		
1				4	5		
	0001	Penyusunan Standar Harga	231.129.550,00	133.231.540,00	57,64	97.898.010,00	
	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	26.872.700,00	0,00	0,00	26.872.700,00	
	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	293.788.256,00	80.391.320,00	27,36	213.396.936,00	
	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	91.172.500,00	17.461.590,00	19,15	73.710.910,00	
	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	73.395.150,00	44.794.000,00	61,03	28.601.150,00	
	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	47.981.000,00	36.610.600,00	76,30	11.370.400,00	
	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	88.332.150,00	1.390.000,00	1,57	86.942.150,00	
	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	57.088.550,00	31.850.900,00	55,79	25.237.650,00	



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan dan aset daerah dan tugas pembantuan.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang Keuangan dan Aset;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Aset;
- g. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Keuangan dan Aset;



- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Keuangan dan Aset sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, BPKAD memiliki tugas yang cukup strategis dalam menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping itu, BPKAD juga mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan Belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Dari tugas dan fungsi BPKAD diatas, BPKAD mempunyai indikator kinerja pada urusan keuangan yaitu :

1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD.
 2. Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu.
 3. Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah.
 4. Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi.
- Adapun pencapaian pelayanan kinerja BPKAD sesuai indikator diatas dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mempawah

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13
1	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Paling lambat akhir Desember tahun anggaran sebelumnya
2	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SP2D terbit maks 2 hari stlh SPM terverifikasi
3	Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemyampaian LKD paling lambat 31 Maret tahun berikutnya
4	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh Aset Daerah tercatat dalam Aplikasi



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah untuk tahun 2025-2026.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain adalah :

1. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
2. Jumlah SDM yang masih terbatas dibanding dengan volume pekerjaan yang ada;
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
4. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang masih belum optimal ;
5. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga



berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindaklanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah.
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset Badan.

2.4 REVEIW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPKAD dengan hasil pencapaian target tahunan.



Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh BPKAD telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja BPKAD.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKAD yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja BPKAD senantiasa diselaraskan dengan Renstra BPKAD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dapat dilihat pada Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 sebagaimana table 2.4 di bawah ini :

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Mempawah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase capaian urusan pemerintah daerah	100%	Rp 6.453.145,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase capaian urusan pemerintah daerah	100%	Rp 6.453.145,00	
1.2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100%	Rp 33.999,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan	100%	Rp 33.999,00	
1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 5.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 5.000,00	
1.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000,00	
1.2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.000,00	
1.2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000,00	
1.2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.000,00	
1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 14.999,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Rp 14.999,00	
1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Rp 5.877.962,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Rp 5.032.470,00	
1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	Rp 5.786.543,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	Rp 4.950.000,00	
1.2.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 56.419,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 44.970,00	
1.2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 27.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 30.000,00	
1.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 7.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 7.500,00	
1.2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 20.900,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 20.900,00	
1.2.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	Rp 20.900,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	Rp 20.900,00	
1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100%	Rp 25.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100%	Rp 25.000,00	
1.2.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket	Rp -	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket	Rp -	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	Rp 25.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	Rp 25.000,00	
1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 106.285,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 394.330,00	
1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 5.565,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 33.396,00	
1.2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 20.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 76.829,00	
1.2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 5.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 47.916,00	
1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp 11.249,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp 69.209,00	
1.2.6.7	Penyediaan Bahan/Material	BPKAD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Rp -	Penyediaan Bahan/Material	BPKAD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Rp 39.930,00	
1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Rp 55.745,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Rp 84.700,00	
1.2.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500 Dokumen	Rp 8.726,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500 Dokumen	Rp 42.350,00	
1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Rp -	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Rp -	
1.2.7.2	Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	Rp -	Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	Rp -	
1.2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	
1.2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	
1.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	154 buah	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	154 buah	Rp -	
1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor	100%	Rp 312.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor	100%	Rp 312.200,00	
1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Rp -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Rp -	
1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp 235.400,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp 235.400,00	
1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 76.800,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 76.800,00	
1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp 76.799,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp 76.799,00	
1.2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp 16.001,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp 16.001,00	
1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	Rp 31.550,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	Rp 31.550,00	
1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Rp 1.750,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Rp 1.750,00	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.2.9.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 unit	Rp 6.387,00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 unit	Rp 6.387,00	
1.2.9.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	Rp 21.111,00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	Rp 21.111,00	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 147.679.273,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 147.679.273,00	
2.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	Rp 1.261.997,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	Rp 1.261.997,00	
2.2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 132.250,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 132.250,00	
2.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 87.413,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Rp 87.413,00	
2.2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 83.210,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 83.210,00	
2.2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 1.239,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 1.239,00	
2.2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 29.830,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 29.830,00	
2.2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 29.430,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Rp 29.430,00	
2.2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	Rp 296.987,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	Rp 296.987,00	
2.2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	Rp 500.860,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	Rp 500.860,00	
2.2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	Rp 100.778,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	Rp 100.778,00	
2.2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perbendaharaan	100%	Rp 348.399,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perbendaharaan	100%	Rp 348.399,00	
2.2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264 dokumen	Rp -	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264 dokumen	Rp -	
2.2.2.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	860 dokumen	Rp -	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	860 dokumen	Rp -	
2.2.2.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 dokumen	Rp 62.029,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 dokumen	Rp 62.029,00	
2.2.2.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 dokumen	Rp -	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 dokumen	Rp -	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan	Rp 49.070,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan	Rp 49.070,00	
2.2.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	Rp 227.400,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	Rp 227.400,00	
2.2.2.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20 dokumen	Rp 9.900,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20 dokumen	Rp 9.900,00	
2.2.2.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp -	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp -	
2.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 417.231,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	100%	Rp 417.231,00	
2.2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	124 laporan	Rp 5.433,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	n/a	Rp 5.433,00	
2.2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	15 dokumen	Rp 82.879,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	15 dokumen	Rp 82.879,00	
2.2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	Rp 18.881,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	Rp 18.881,00	
2.2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 laporan	Rp 163.715,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 dokumen	Rp 163.715,00	
2.2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 dokumen	Rp 135.832,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 dokumen	Rp 135.832,00	
2.2.3.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp -	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp -	
2.2.3.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp -	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Rp -	
2.2.3.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	Rp -	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	Rp -	
2.2.3.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp -	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Rp -	
2.2.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 10.491,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 10.491,00	
2.2.3.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 lembaga	Rp -	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 lembaga	Rp -	

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Rp 145.452.596,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Rp 145.452.596,00	
2.2.4.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	Rp 125.584.133,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	Rp 125.584.133,00	
2.2.4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	Rp 7.424.025,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	Rp 7.424.025,00	
2.2.4.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 12.444.438,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 12.444.438,00	
2.2.5	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase capaian Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100%	Rp 199.050,00	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase capaian Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100%	Rp 199.050,00	
2.2.5.2	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	Rp 199.050,00	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	Rp 199.050,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	Rp 647.338,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	Rp 1.865.861,00	
3.2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	Rp 647.338,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	Rp 1.865.861,00	
3.2.1.1	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	Rp 185.837,00	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	Rp 271.998,00	
3.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	Rp -	
3.2.1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 dokumen	Rp 10.766,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 dokumen	Rp 10.766,00	
3.2.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 dokumen	Rp -	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 dokumen	Rp -	
3.2.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Rp 240.146,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Rp 588.162,00	
3.2.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp -	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp -	
3.2.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	Rp 48.598,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	Rp 185.000,00	
3.2.1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 53.895,00	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 274.895,00	
3.2.1.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 laporan	Rp -	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 laporan	Rp 165.575,00	
3.2.1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 dokumen	Rp 39.981,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 dokumen	Rp 39.981,00	
3.2.1.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 35.112,00	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	Rp 35.112,00	
3.2.1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	Rp 33.003,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	Rp 33.003,00	
3.2.1.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp -	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	Rp 261.369,00	



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung BPKAD, LSM, asosiasi-asosiasi atau perguruan tinggi. Mengingat BPKAD merupakan SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga penyajian tabel tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tidak dapat tersaji.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Beberapa kebijakan nasional dalam perencanaan pembangunan yang harus menjadi acuan pemerintah daerah termasuk SKPD di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
3. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan
4. Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Berdasarkan uraian di



atas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah menetapkan tujuan :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Publik.
2. Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Kabupaten Mempawah sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Mempawah dalam menyusun program dan kegiatan bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Mempawah utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 5) Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada rumusan Program dan Kegiatan telah sesuai dengan perubahan RKPD Tahun 2025. Program, Kegiatan dan Pendanaan yang disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Mempawah bisa dilihat pada tabel matriks Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Mempawah tahun 2025 yang tertuang pada Tabel. 4.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																												
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah							161.541.976.290,00	155.807.497.912,00	154.702.971.159,15						0,00								
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							161.541.976.290,00	155.807.497.912,00	154.702.971.159,15						0,00								
	5	02			KEUANGAN							161.541.976.290,00	155.807.497.912,00	154.702.971.159,15						0,00								
1	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				-	95 persen	7.631.495.222,00	6.572.020.708,00	6.376.349.474,15							0,00							
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketetapan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan	-			-	100 persen	70.000.000,00	33.999.900,00	33.999.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																					0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	14.999.900,00	14.999.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	-			100	100	6.422.891.022,00	5.870.805.208,00	5.870.805.208,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	6.323.891.022,00	5.779.385.558,00	5.786.543.299,15	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	59.000.000,00	56.419.650,00	56.419.650,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	-			100 persen	100 persen	20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	-			-	100 persen	70.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				49 Paket	49 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	-			95 persen	95 persen	287.950.000,00	248.076.150,00	248.076.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	27.828.300,00	5.565.660,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	59.250.000,00	59.250.000,00	20.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	36.000.000,00	36.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	34.999.700,00	11.249.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	84.700.000,00	75.000.000,00	55.745.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4500 Dokumen	4500 Dokumen	15.000.000,00	14.998.150,00	8.726.350,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			80 persen	80 persen	378.504.200,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.746.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				154 Unit	154 Unit	327.758.200,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			95 persen	95 persen	240.000.000,00	235.400.000,00	235.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	240.000.000,00	235.400.000,00	235.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			95 persen	95 persen	141.250.000,00	137.839.450,00	137.839.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	23.000.000,00	22.859.450,00	16.001.615,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	62.000.000,00	62.000.000,00	31.550.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	1.750.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				53 Unit	53 Unit	21.500.000,00	18.250.000,00	6.387.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	29.750.000,00	29.730.000,00	21.111.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	151.531.363.400,00	148.107.548.348,00	147.679.279.045,00							0,00			
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran daerah	-			100 persen	100 persen	1.909.223.700,00	1.554.096.650,00	1.554.096.650,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	205.186.400,00	151.806.400,00	132.250.200,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	159.956.700,00	108.439.100,00	87.413.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	164.806.300,00	102.380.600,00	83.210.700,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	124.955.200,00	54.839.000,00	1.239.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	79.816.000,00	31.706.600,00	29.830.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	79.625.000,00	79.230.600,00	29.430.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	375.228.300,00	375.228.300,00	296.987.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	528.192.000,00	528.192.000,00	500.860.022,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	191.457.800,00	122.274.050,00	100.778.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	-			100 persen	100 persen	606.404.990,00	492.850.000,00	492.850.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				264 Dokumen	264 Dokumen	24.200.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				860 Dokumen	860 Dokumen	33.275.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				7 Dokumen	7 Dokumen	78.650.000,00	78.650.000,00	62.029.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	12 Dokumen	47.789.990,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	2 Laporan	121.200.000,00	110.000.000,00	49.070.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	227.480.000,00	227.400.000,00	227.400.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				20 Dokumen	20 Dokumen	40.535.000,00	15.000.000,00	9.900.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	33.275.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	-			100 persen	100 persen	795.823.000,00	674.966.178,00	674.966.178,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				372 Laporan	372 Laporan	20.018.600,00	15.000.000,00	5.433.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				124 Dokumen	124 Dokumen	170.057.000,00	160.103.978,00	82.879.611,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	39.999.800,00	39.963.200,00	18.881.100,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	289.999.600,00	249.899.200,00	163.715.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	235.750.100,00	180.000.000,00	135.832.120,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	39.997.900,00	29.999.800,00	10.491.900,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realiasi pencairan dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak	-			100 persen	100 persen	147.721.911.710,00	144.887.635.520,00	144.887.635.520,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000.000,00	125.613.072.000,00	125.584.133.300,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.424.025.661,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.721.911.710,00	11.274.563.520,00	12.444.438.431,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Perizinan Tertentu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase realisasi capaian pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	-			100 persen	100 persen	498.000.000,00	498.000.000,00	498.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	498.000.000,00	498.000.000,00	199.050.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketetapan Waktu Penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai ketentuan				100 %	100 persen	2.379.117.668,00	1.127.928.856,00	647.342.640,00							0,00					
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan	-			100 persen	100 persen	2.379.117.668,00	1.127.928.856,00	1.127.928.856,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	247.299.225,00	240.359.550,00	185.837.842,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																						0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	35.241.795,00	30.762.700,00	10.766.945,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	479.479.395,00	346.453.256,00	240.146.869,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	824.812.093,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	138.943.500,00	138.943.500,00	48.598.500,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																						
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	205.520.100,00	104.279.150,00	53.895.150,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																						
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	135.000.000,00	90.000.000,00	39.981.000,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100.322.150,00	100.322.150,00	35.112.752,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	155.749.300,00	76.808.550,00	33.003.582,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																				0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	36.750.110,00	0,00	0,00	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											J U M L A H		161.541.976.290,00	155.807.497.912,00	154.702.971.159,15							0,00	



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renja BPKAD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2026 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2025. Rencana Kerja ini selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan



penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja Perubahan BPKAD Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian semoga Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Mempawah ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparat Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya, serta Pemerintah Kabupaten Mempawah pada umumnya.